

EKSISTENSI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN (*SAFEGUARD*) INDONESIA

TESIS

Oleh :

RAMZIATI
047005011/HK



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2006

THE EXISTENCE AND HARMONIZATION OF TRADE SAFEGUARD POLICY IN INDONESIA

Ramziati *)
Bismar Nasution**)
Mahmul Siregar**)
Syafrudin Sulung Hasibuan**)

ABSTRACT

Liberalization process of international trade through tariff reduction and progressively no tariff abolishment has been one side leading into the improvement of national and international economic. On the other side, the system causes negative impact an national economic for the members state. One of negative impacts which can be found is the reduction price of imparted goods and domestic market in members' state. In anticipating the possibility, World Trade Organization (WTO) provides the instrument of trade safeguard as the result of imparted goods reduction prices, as it is arranged in Article XIX GATT 1994 regarding agreement of safeguard. Indonesia, as the member of WTO, has the obligation to implement the agreement of safeguard in the scope of its national law and to have harmonization of law with the clauses in WTO. Based on the above mentioned, the government issues Presidential Decree No. 82 of 2002 about Safeguard action on domestic industries from imported goods reduction prices.

This research uses normative law research with qualitative data analysis method focused on primary and secondary of law material. This research tries to analyze the existence and harmonization of trade safeguard policy in Indonesia with agreement on safeguard.

Based an the result of data analysis, it is concluded that presidential decree No. 84 of 2002 is in fact formally not against the clauses of WTO considering that the clauses of WTO do not determine the formality of canonization of law. See from the protection and domestic industries trade, relying on the presidential decree of trade safeguard is not adequate. There are several things to be upgraded to strengthen domestic industries more competitive. Seen from the substance of Presidential Decree, the safeguard on trade is synchronized to agreement on safeguard.

Further, this research recommend the suggestion such as the necessity in accelerating the completion of trade law by the government as the guidance in making international Trade policy, upgrade the substance of presidential decree for trade safeguard and to multiply socialization to the community especially business entrepreneurs. It is also to empower domestic industries by having the reform of bureaucracy of law certainty.

Keywords: *Trade Safeguard, Safeguard, WTO*

*) Student of School of Postgraduate Studies, Faculty of Law, University of North Siimatera, Medan.

**) Lecturer of School of Postgraduate Studies, Faculty of Law, University of North Suma tera Medan

EKSISTENSI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (*SAFEGUARD*) INDONESIA

Ramziati*)
Bismar Nasution**)
Mahmul Siregar**)
Syafuruddin S. Hasibuan**)

ABSTRAK

Proses liberalisasi perdagangan internasional melalui reduksi hambatan tarif dan penghapusan secara progresif hambatan non tarif pada satu sisi membawa kebaikan pada perekonomian internasional dan nasional. Di sisi lain sistem ini dapat pula menimbulkan dampak negatif pada perekonomian nasional negara anggota. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi adalah melonjaknya barang impor di pasar domestik yang dapat suatu negara anggota. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut *World Trade Organization* (WTO) menyediakan instrumen pengamanan perdagangan akibat lonjakan barang impor sebagaimana diatur dalam *Article XIX GATT 1994* tentang *Agreement on Safeguard*. Indonesia sebagai anggota WTO memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan *Agreement on Safeguard* dalam hukum nasionalnya dan melakukan harmonisasi hukum dengan ketentuan-ketentuan WTO. Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan Keppres No.84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis data kualitatif yang bertumpu pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini mencoba menganalisis eksistensi dan harmonisasi kebijakan pengamanan perdagangan (*Safeguard*) Indonesia dengan *Agreement on Safeguard*.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa Keppres No.84 Tahun 2002 secara formal tidak bertentangan dengan ketentuan WTO, mengingat bahwa ketentuan WTO tidak menentukan formalitas harmonisasi hukum. Dilihat dari upaya perlindungan industri dalam negeri, mengandalkan Keppres Pengamanan Perdagangan saja tidak cukup. Banyak hal yang harus dibenahi untuk memberdayakan untuk memberdayakan dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. Dari segi substansi Keppres pengamanan perdagangan sinkron dengan *Agreement on Safeguard*.

Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan saran-saran antara lain perlunya pemerintah mempercepat penyelesaian Undang-Undang Perdagangan sebagai pedoman pembuatan kebijakan perdagangan internasional, memperbaharui substansi Keppres Pengamanan Perdagangan dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, khususnya dunia usaha. Tak kalah pentingnya untuk memberdayakan industri dalam negeri adalah reformasi birokrasi dan kepastian hukum.

Keyword : Pengamanan Perdagangan, *Safeguard*, WTO

*) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

**) Dosen Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.